



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN**  
**KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

JALAN A.YANI KM 29,42 GUNUNG MANGGIS, BANJARBARU 70724  
TELEPON (0511) 4783155, FAKSIMILE (0511) 4783546  
LAMAM : [www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin](http://www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin) SUREL : [bkikls2bjm@yahoo.com](mailto:bkikls2bjm@yahoo.com)

Yth.Sekretaris Badan PPMHKP  
Cq. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kinerja  
Jakarta

**SURAT PENGANTAR**  
**NOMOR B.1014/BKIPM.BJM/TU.210/X/2024**

No.	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024	1 (satu) Berkas	Untuk dipergunakan sebagai bahan laporan.

Penerima  
Nama Jabatan

Banjarbaru, 11 Oktober 2024  
Pengirim  
Kepala Balai KIPM  
Banjarmasin,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Nama Lengkap  
Diterima

Hafit Rahman

tanggalNo. Hp



Kementerian  
Kelautan dan Perikanan

# 2024

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN

## III

## **BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

Jl. A.Yani 29,4 Guntung Manggis,  
Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,  
Kalimantan Selatan  
70721

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRé, BSSN



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin (LKj Balai KIPM Banjarmasin) Triwulan III tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Banjarmasin dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024. Secara umum, pada Triwulan III tahun 2024 beberapa target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai dengan baik.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Banjarbaru, 10 Oktober 2024  
Kepala Balai KIPM Banjarmasin,



Hafit Rahman, S.Pi, M.P



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
PENDAHULUAN .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1 LATAR BELAKANG.....	5
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	6
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	7
BAB II AKUNTABILITAS KERJA.....	8
2.1 CAPAIAN KINERJA .....	8
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI.....	10
2.3 REALISASI ANGGARAN.....	26
PENUTUP.....	28
BAB III PENUTUP .....	28
3.1 KESIMPULAN .....	28
3.2 REKOMENDASI .....	29
BAB IV LAMPIRAN .....	30
4.1 PERJANJIAN KINERJA.....	30
4.2 PENGHARGAAN .....	31



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Banjarmasin.....	7
Gambar 2. Dashboard capaian IKU/IKM pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja .....	8
Gambar 3. Publikasi nilai SKM pada sosial media instagram .....	17
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024 .....	31
Gambar 5. Piagam Penghargaan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024.....	31



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin TW III Tahun 2024 .....	9
Tabel 2. Target dan Realisasi IKU 1 pada TW III Tahun 2024 .....	11
Tabel 3. Target dan Realisasi IKU 2 pada TW III Tahun 2024 .....	12
Tabel 4. Target dan Realisasi IKU 3 pada TW III Tahun 2024 .....	13
Tabel 5. Target dan Realisasi IKU 4 pada TW III Tahun 2024 .....	14
Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 5 pada TW III Tahun 2024 .....	15
Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 6 pada TW III Tahun 2024 .....	16
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU 7 pada TW III Tahun 2024 .....	18
Tabel 9. Target dan Realisasi IKM 8 pada TW II Tahun 2024 .....	19
Tabel 10. Target dan Realisasi IKM 9 pada TW III Tahun 2024 .....	20
Tabel 11. Target dan Realisasi IKM 10 pada TW III Tahun 2024 .....	21
Tabel 12. Target dan Realisasi IKM 11 pada TW III Tahun 2024 .....	22
Tabel 13. Target dan Realisasi IKM 12 pada TW III Tahun 2024 .....	22
Tabel 14. Target dan Realisasi IKM 13 pada TW III Tahun 2024 .....	23
Tabel 15. Target dan Realisasi IKM 14 pada TW III Tahun 2024 .....	24
Tabel 16. Target dan Realisasi IKM 15 pada TW III Tahun 2024 .....	25
Tabel 17. Target dan Realisasi IKM 16 pada TW III Tahun 2.....	25
Tabel 18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW III 2024 .....	26
Tabel 19. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW III 2024.....	27



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin tahun 2024 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Balai KIPM Banjarmasin telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Periode Tahun 2024.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar **113,39%** Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKU/IKM) Balai KIPM Banjarmasin yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan IKU/IKM Balai KIPM Banjarmasin berjumlah 16 (enam belas) yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu :
  - a. Pengendalian Mutu
  - b. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
  - c. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP
2. Uraian IKU/IKM yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:

## **Kegiatan 1. Pengendalian Mutu**

IKU1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (sertifikat) – target dan capaian, terealisasi pada triwulan I, II dan III (Realisasi melebihi target)
IKU2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi) – target dan capaian terealisasi
IKU3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI) – target dan capaian terealisasi.

- IKU 4 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk) – Realisasi tercapai melebihi target
- IKU 5 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI) – Realisasi tercapai melebihi target.

### **Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan**

- IKU6 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai) - Realisasi tercapai melebihi target
- IKU7 Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) – target dan capaian pada triwulan IV.

### **Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP**

- IKM8 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) - target tahunan
- IKM9 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) – capaian pada semester II.
- IKM 10 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) – target tahunan
- IKM 11 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – target tahunan
- IKM12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – Realisasi tercapai melebihi target.
- IKM 13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) – Realisasi tercapai melebihi target semester.
- IKM 14 Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) – target tahunan
- IKM15 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – target tahunan



IKM16

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Balai  
KIPM Banjarmasin (%) – target tahunan

Pagu anggaran sebesar Rp. 5.726.970.000,- (*lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan III Tahun 2024 mencapai Rp 3.964.026.629,- (*tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 69,22 %.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP Banjarmasin. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP Banjarmasin serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP Banjarmasin. Selain untuk memenuhi prinsip

akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala BKIPM Banjarmasin dibantu oleh 1 Pejabat Struktural yaitu Kepala Sub Bagian Umum (Tim Kerja Dukungan Manajerial), dan 3 Tim Kerja yaitu Pengendalian Mutu, Pengawasan Mutu, Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung BPPMHKP Banjarmasin sejumlah 18 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 4 pegawai fungsional inspektur mutu, 4 pegawai fungsional asisten inspektur mutu, 2 pegawai analis pengelola keuangan APBN ahli pertama dan muda, 1 pegawai fungsional umum penelaah teknis kebijakan, 1 pegawai fungsional pengadministrasi umum, dan 2 Pegawai PPPK serta dibantu oleh 11 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 1 orang PJLP. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi Balai KIPM Banjarmasin dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Banjarmasin

### 1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

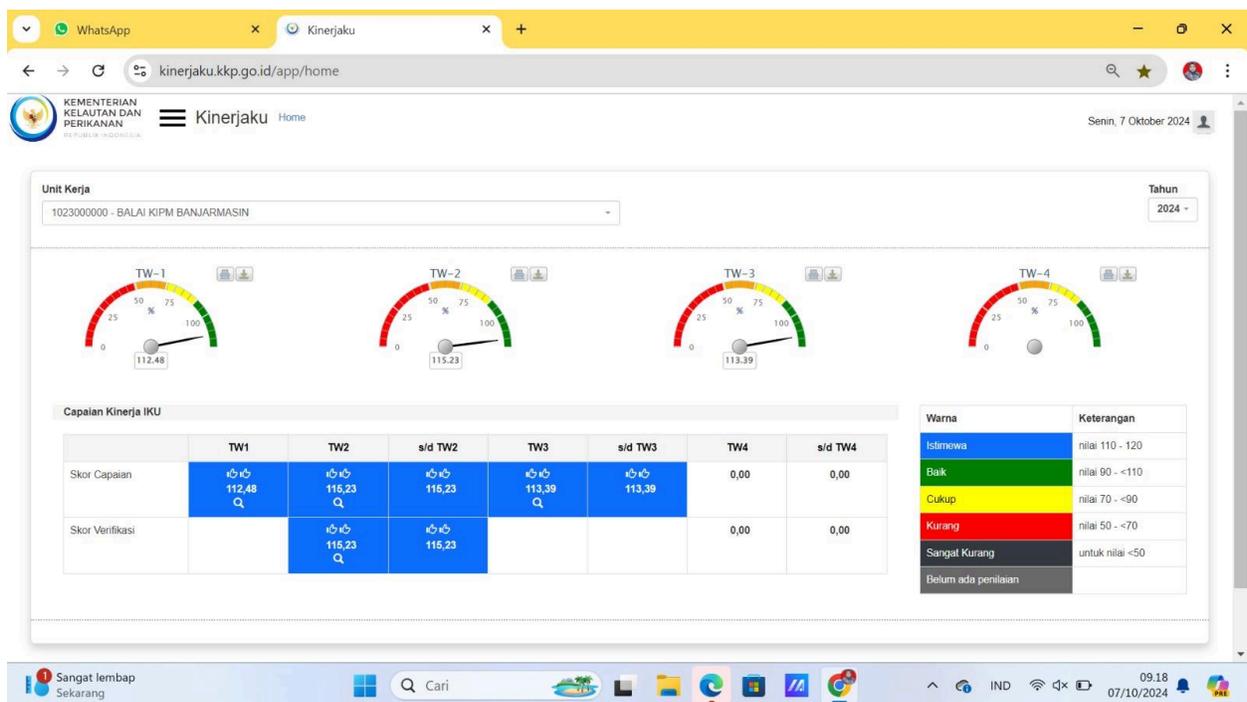
# BAB 2

## AKUNTABILITAS KINERJA

### BAB II AKUNTABILITAS KERJA

#### 2.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan III tahun 2024 masuk dalam kategori “Istimewa”, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **113.39%** berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).



Gambar 2. Dashboard capaian IKU/IKM pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja



Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin TW II Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024	TARGET TW III	REALISASI TW III
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>						
SK1. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (sertifikat)	10	6	14
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi)	3	3	3
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	5	3	3
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk )	17	15	18
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	12	8	9
<b>Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>						
SK2. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)	84	84	92,12
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	3	0	0
<b>Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP</b>						
SK3. 1	Tatakelola pemerintahan yang	8	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah	75	84	0

baik lingkup BPPMHKP		Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)			
	9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	86	0	90.02
	10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	82	0	0
	11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	100	0	0
	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80	80	100
	13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	93,76	0	97.94
	14	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	82	0	0
	15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80	0	0
	16	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80	0	0

## 2.2 ANALISIS DAN EVALUASI

### **Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.**

Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing diperoleh dari pencapaian pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.

**Kegiatan 1. Pengendalian Mutu****IKU 1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Sertifikat CPIB di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/ Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB.

Realisasi indikator Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BPPMHKP Banjarmasin sudah terealisasi sejumlah 14 sertifikat pada triwulan III 2024 dari target tahunan sejumlah 10 sertifikat.

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi IKU 1 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (sertifikat)	10	5	-	10	10	6	14	233,3	10	57

Tabel 2. Target dan Realisasi IKU 1 pada TW III Tahun 2024

**IKU 2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi)**

Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP) berkontribusi dalam implementasi Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat bersama dengan beberapa instansi terkait antara lain seperti Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, BP-POM, Universitas Lambung Mangkurat, Pemerintah Kabupaten/Kota dll;

Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik dalam rangka Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan Berbahaya di lingkungan perairan, Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik.

Pada tahun 2024, telah ditetapkan target sebanyak 3 (tiga) lokasi yang dilaksanakan untuk 2 periode. Untuk triwulan III sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi IKU 2 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi)	1	1	1	1	3	3	3	100	3	3

Tabel 3. Target dan Realisasi IKU 2 pada TW III Tahun 2024

### **IKU 3. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI)**

Traceability atau Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.

Mengacu pada Peraturan Kepala BPPMHKP No. 170/Per BPPMHKP/2019 tentang Penerapan Sistem Traceability (Ketertelusuran) di UPI, bahwa UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. Melalui traceability/ketertelusuran kemampuan untuk melacak (*tracing*) dan mengikuti jejak (*tracking*) produk pada seluruh mata rantai produksi, pengolahan, serta distribusi sehingga dapat diketahui dari mana asal bahan baku (*backward*), bagaimana produk ditangani disetiap tahapannya hingga kemana produk didistribusikan (*forward*). Surat Keterangan Penerapan Sistem Traceability Unit Pengolahan Ikan (UPI) diberikan kepada UPI yang telah menyusun program dan prosedur sistem ketertelusuran dan telah menerapkannya dan UPI telah membuktikan penerapan sistem traceability dengan simulasi penerapannya pada saat dilakukan evaluasi/inspeksi sistem traceability dengan masa berlaku surat keterangan tersebut adalah 2 (dua) tahun dari tanggal diterbitkan.

Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* (ketertelusuran) melalui

verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Kegiatan traceability dilaksanakan oleh inspektur mutu Balai KIPM Banjarmasin berdasarkan SOP yang berlaku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan sertifikasi HACCP. Pelaksanaan jadwal dan UPI yang dilakukan evaluasi *traceability* mengikuti program Pusat Pengendalian Mutu - BPPMHKP.

Target Indikator unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) pada tahun 2024 sebanyak 5 UPI yang telah dilaksanakan pada triwulan 2, sehingga realisasi indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI) mencapai 3 UPI dari target triwulan 3 yang ditetapkan sebanyak 3 UPI.

**Tabel 4**  
**Target dan Realisasi IKU 3 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	-	5	5	3	5	3	3	100	5	5

Tabel 4. Target dan Realisasi IKU 3 pada TW III Tahun 2024

#### **IKU 4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk)**

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industry pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pengukuran diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP

$$A = B + C$$

Keterangan :

B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan

C = Hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi

Pada tahun 2024, telah ditetapkan target Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin sebanyak 17

(tujuh belas) produk. Tahun 2024 realisasi pada indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk) sebanyak 17 produk dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 18 telah tercapai dari target triwulan 3 sebanyak 15 produk sehingga capaiannya mencapai 120 %.

**Tabel 5**  
**Target dan Realisasi IKU 4 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Produk)	11	17	16	17	17	15	18	120	17	17

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU 4 pada TW III Tahun 2024

#### **IKU 5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)**

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang disertifikasi HACCP pada tahun 2024. Realisasi indikator sampai dengan triwulan III tahun 2024 sebanyak 9 UPI atau 112,5% dari target triwulan 3 yang ditetapkan sebanyak 8 UPI.



**Tabel 6**  
**Target dan Realisasi IKU 5 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	-	-	-	11	12	8	9	112,5	12	12

Tabel 6.Target dan Realisasi IKU 5 pada TW III Tahun 2024

### **Kegiatan2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan**

#### **IKU 6. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/40> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT KKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Balai KIPM Banjarmasin mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil yang ingin dicapai dari Survei Kepuasan Masyarakat adalah perbaikan pelayanan kepada masyarakat melalui Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna dan tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Triwulan 3 Tahun 2024 nilai SKM Balai KIPM Banjarmasin mencapai 92,12 dengan kategori "SANGAT BAIK", Realisasi Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik (nilai) lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2024 telah melebihi target triwulan yang ditetapkan yaitu 84.

**Tabel 7**  
**Target dan Realisasi IKU 6 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW II Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)	-	-	-	84	84	84	92,12	109,67	84	84

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 6 pada TW III Tahun 2024



Gambar 3. Publikasi nilai SKM pada sosial media instagram

### **IKU 7. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)**

Melaksanakan Verifikasi *Quality Assurance* (Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) pada proses Pembudidayaan ikan (Pembenihan, Pembesaran) apakah sudah memenuhi Persyaratan/Standar di lokasi Kawasan/Kampung Budidaya. Indikator kegiatan ini adalah jumlah lokasi yang telah dilakukan Verifikasi *Quality Assurance* di lokasi/Kawasan Budidaya.

Ruang lingkup Kegiatan Verifikasi *Quality Assurance* meliputi :

1. Sosialisasi *Quality Assurance* dan Pembentukan Pokja *Quality Assurance*
2. Bimbingan Teknis Petugas *Quality Assurance*
3. Pelaksanaan Verifikasi *Quality Assurance*
4. Pelaporan
5. Penyampaian Rekomendasi ke Menteri

Target indikator lokasi usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) lokasi tidak terdapat target dan belum terealisasi pada triwulan III.

**Tabel 8**  
**Target dan Realisasi IKU 7 TW III pada Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	-	-	-	-	3	0	0	0	3	3

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU 7 pada TW III Tahun 2024

### **Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP**

#### **Sasaran Kegiatan 3 . Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP**

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP diperoleh dari pencapaian Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks), Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Banjarmasin, Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai), Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai), Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%).

#### **IKM 8. Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin(unit)**

Pembangunan Zona Integritas pada Balai KIPM Banjarmasin tetap dilaksanakan sesuai amanat yang telah diberikan semenjak tahun tahun sebelumnya, meskipun sampai dengan

bulan Juni 2024 belum terdapat evaluasi dari tim inspektorat jenderal KKP ataupun dari internal Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini juga termasuk dalam IKM yang mempunyai target pada akhir tahun 2024.

Pemenuhan Dokumen Pembangunan ZI untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi tetap dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab dan anggota tim dari masing-masing pengungkit.

**Tabel 9**  
**Target dan Realisasi IKM 8 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (unit)	-	-	-	1	75	0	0	0	75	75

Tabel 9. Target dan Realisasi IKM 8 pada TW III Tahun 2024

### **IKM 9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula menghitung capaian indikator indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Realisasi indikator indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) bersifat semesteran, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi hasil capaian indeks seperti

pejabat struktural yang telah selesai mengikuti Diklat Pimpinan dan masih terdapatnya ASN dengan kualifikasi Pendidikan SMU/SMK sederajat. Dalam IKM Tahun 2024 telah terealisasi dengan nilai 90.02 pada semester I dan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 81. Indeks profesionalitas ASN pada triwulan 3 tidak terdapat target dan realisasi namun terdapat target dan akan direalisasi pada semester II.

**Tabel 10**  
**Target dan Realisasi IKM 9 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	60	72	73	83	84	0	0	0	86	86

Tabel 10. Target dan Realisasi IKM 9 pada TW III Tahun 2024

#### **IKM 10. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yakni "Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindak lanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan".

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (*Self Assesment*) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM.

Hasil evaluasi/Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (*Rapid Assesment*) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja, masih terdapat beberapa kekurangan terkait redaksi pada dokumen dokumen SAKIP Balai KIPM Banjarmasin yang disampaikan baik melalui Gdrive atau Aplikasi ESR Menpan.

Penilaian indikator nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin dilakukan oleh Pusat Karantina Ikan yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil

Rekonsiliasi oleh Biro Perencanaan untuk menilai aspek kepatuhan (bobot 30%), kesesuaian (bobot 30%) dan ketercapaian (bobot 40%). Target nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024 adalah 82 dan akan dilakukan penilaian Mandiri oleh Tim BPPMHKP pada akhir Tahun Anggaran 2024 sehingga untuk triwulan III masih belum terdapat capaian.

Tabel 11

## Target dan Realisasi IKM 10 pada TW III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin	85	85	85	85	85	0	0	0	82	82

Tabel 11. Target dan Realisasi IKM 10 pada TW III Tahun 2024

**IKM 11. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern. Formulasi Penyelesaian Temuan BPK BPPMHKP adalah :

Penyelesaian Temuan atas laporan keuangan TA.2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan X 100  
Realisasi rilltahun2024

Keterangan:

Persentase penyelesaian temuan atas laporan keuangan TA.2024 (Audited) target 100%

Dengan target Tahunan, Penyelesaian Temuan BPK BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin ini dapat terealisasi 100 % tanpa nilai temuan dari BPK sampai akhir Tahun Anggaran 2024.



**Tabel 12**  
**Target dan Realisasi IKM 11 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	1%	1%	-	≤1	100	0	0	0	100	100

Tabel 12. Target dan Realisasi IKM 11 pada TW III Tahun 2024

**IKM 12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin (%)**

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2024 mencapai 100% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 80. Pada Tahun 2024, target indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan III adalah target 80% dengan realisasi sebesar 100%, karena sampai Bulan September belum ada Pengawasan Internal dari Inspektorat Jenderal KKP.

**Tabel 13**  
**Target dan Realisasi IKM 12 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin (%)	-	82	65	70	75	80	100	120	80	80

Tabel 13. Target dan Realisasi IKM 12 pada TW III Tahun 2024

**IKM 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri dari (Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari (Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari (Capaian Output), pada tahun 2024 masih terdapat kelemahan pada indikator Deviasi halaman III DIPA terkait dengan penyampaian dan pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin semester 2 tahun 2024 adalah 83. Realisasi indikator nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Banjarmasin dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dengan nilai 97,94. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan 3 tidak terdapat target dan realisasi namun terdapat target dan akan direalisasi pada semester II.

**Tabel 14**  
**Target dan Realisasi IKM 13 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	-	88	89	89	93,75	0	0	0	93,76	93,76

Tabel 14. Target dan Realisasi IKM 13 pada TW III Tahun 2024

#### **IKM 14. Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART KEMENKEU dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, Nilai sangat dipengaruhi dengan efisiensi penggunaan anggaran yang sebenarnya berbanding

terbalik dengan kewajiban satker untuk peningkatan capaian anggaran agar serapan anggaran bisa maksimal.

Target yang ditetapkan pada indikator nilai kinerja anggaran Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 adalah 82 dan pada periode triwulan III 2024 belum ada realisasi karena target realisasinya bersifat tahunan.

**Tabel 15**  
**Target dan Realisasi IKM 14 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	87	88	86	81	82	0	0	0	82	82

Tabel 15. Target dan Realisasi IKM 14 pada TW III Tahun 2024

### **IKM 15. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon II diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu : Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%), Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Target yang ditetapkan pada indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 adalah 80 dan capaian realisasi Tahun 2024 akan dicapai pada akhir tahun 2024.



**Tabel 16**  
**Target dan Realisasi IKM 15 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW II Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	-	-	-	75	77,5	0	0	0	80	80

Tabel 16. Target dan Realisasi IKM 15 pada TW III Tahun 2024

#### **IKM 16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon II diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%), tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%), tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%), pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (bobot 25%) dan Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu dengan (bobot 20%).

Target yang ditetapkan pada indikator Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN BPPMHKP lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 adalah 80 dan capaian realisasi Tahun 2024 akan dicapai pada akhir tahun 2024.

**Tabel 17**  
**Target dan Realisasi IKM 16 pada TW III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW III Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	-	-	-	75	77,5	0	0	0	80	80

Tabel 17. Target dan Realisasi IKM 16 pada TW III Tahun 2

## 2.3 REALISASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan Balai KIPM Banjarmasin Triwulan III Tahun 2024 melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 5.726.970.000,- (*lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan III Tahun 2024 mencapai Rp 3.964.026.629,- (*tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 69,22 %.

Alokasi anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah Rp 5.726.970.000, (*lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Anggaran ini terdiri dari Rupiah murni sebesar Rp 5.699.598.000,- (*lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) dan PNPB sebesar Rp 27.372.000,- (*dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*). Sampai Triwulan III Tahun 2024 realisasi penyerapan anggaran sumber dana RM Balai KIPM Banjarmasin mencapai Rp 3.955.868.695,- (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*) atau sebesar 69,41 % sedangkan untuk sumber dana PNPB realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 8.157.934,- (*delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) atau sebesar 29,80 %

Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin T.A 2024 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 1.3 dan Tabel 1.4.

**Tabel 1.3**

### **Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW III 2024**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Pegawai	3.055.349.000	2.345.453.266	709.895.734	76.77
2	Barang	2.671.621.000	1.618.573.363	1.053.047.637	60.58
3	Modal	0	0	0	0
	TOTAL	5.726.970.000	3.964.026.629	1.762.943.371	69.22

Tabel 18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW III 2024

**Tabel 1.4****Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW III 2024**

No	Kode/Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	3989/ Pengendalian Mutu	339.000.000	201.765.609	137.234.391	59.52
2	7010	116.000.000	29.887.436	86.112.564	25.77
3	3987 / Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.271.970.000	3.732.373.584	1.539.596.416	70.80
	TOTAL	5.726.970.000	3.964.026.629	1.762.943.371	69.22

Tabel 19. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW III 2024

# BAB 3

---

## *PENUTUP*

---

### BAB III PENUTUP

#### 3.1 KESIMPULAN

Dari capaian-capaian yang telah dilaksanakan pada kinerja triwulan III Tahun 2024 juga menjawab beberapa rekomendasi permasalahan dan kendala pada triwulan sebelumnya, diantaranya : Telah dilakukan Update berkelanjutan skema Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai jadwal dari Kementerian Keuangan RI secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan rencana pada Halaman III DIPA. Serta melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pencapaian IKU dan IKM yang dilakukan setiap Bulan bertepatan dengan Rapat Bulanan oleh masing masing penanggung jawab kegiatan dan keuangan Balai KIPM Banjarmasin. Dan juga telah melakukan update kebutuhan formasi SDM kepada Biro SDMAO melalui Tim Sekretariat BPPMHKP pada acara kegiatan Forum Kepegawaian.

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Banjarmasin triwulan III Tahun 2024 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Balai KIPM Banjarmasin pada periode kedua tahun anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Terhadap capaian IKU dan IKM tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU dan IKM Balai KIPM Banjarmasin yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan III tahun 2024 dan akan coba diperbaiki pada Triwulan IV, antara lain:

- i) Masih harus selalu update Rencana Penarikan Dana yang mempengaruhi Indikator deviasi Halaman III DIPA seiring dengan perubahan nomenklatur kelembagaan;
- ii) Persiapan untuk perubahan Perjanjian Kinerja yang menyesuaikan dengan Nomenklatur Organisasi yang baru yaitu BPPMHKP.

### 3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan III tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- i) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) berdasarkan target IKU dan IKM serta rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dari masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024.
- ii) Tim Perencanaan dan Program agar melakukan Update skema Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk setiap triwulan di Tahun 2024 sesuai jadwal dari Kementerian Keuangan RI agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan Rencana pada Halaman III DIPA dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan Kementerian Keuangan;
- iii) Menyiapkan dari awal rencana perubahan Perjanjian Kinerja sesuai dengan nomenklatur baru BPPMHKP yang akan direalisasikan sesuai dengan IKU dan IKM yang di ampu oleh Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan IV Tahun 2024 .

# BAB 4

## LAMPIRAN

### BAB IV LAMPIRAN

Perjanjian kinerja dan penghargaan yang diraih oleh Balai KIPM Banjarmasin selama tahun 2024.

#### 4.1 PERJANJIAN KINERJA

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10116, KOTAK POS 4132 JOP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAR [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) EMAIL [webmaster@kkp.go.id](mailto:webmaster@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN**  
**KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hafit Rahman**  
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : Pjt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua  
Pjt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
  
Ishartini

Pihak Pertama  
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin  
  
Hafit Rahman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN**  
**KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>		
SK1.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1 Jumlah sertifikat CPiB supplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (sertifikat)	10
	2 Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	3
	3 Unit Penganganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	5
	4 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) nuang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk )	17
	5 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	12
<b>Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>		
SK2.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	6 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)	84
	7 Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	3
<b>KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP</b>		
SK3.1 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	8 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	75
	9 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	86
	10 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	82
	11 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	100
	12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	93,76
	14 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	82
	15 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80
	16 Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saling Industri	206,750,000,-
	Pengendalian Mutu	260,750,000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	206,500,000,-
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	206,500,000,-
3	Program Dukungan Manajemen	5,705,805,000
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5,705,805,000
<b>Total Anggaran Tahun 2024</b>		<b>6,173,055,000,-</b>

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua: Pjt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 Pihak Pertama: Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin

Ishartini  
 Hafit Rahman

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024

## 4.2 PENGHARGAAN



Gambar 5. Piagam Penghargaan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024